

Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin

Elliya Agus¹⁾; Muhammad Safri²⁾

¹⁾ Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

²⁾ Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

Abstract.

This research aimed to test and obtain empirical evidence of a direct effect of the components of financial performance of local governments to capital expenditure Merangin Regency in 2001-2015. The results showed that the degree of decentralization is still very low as the average over 15 years amounted to only 5.16% were categorized as very reendah. It is claimed that PAD Merangin Regency is still a major effect on revenues, seen from efectifivty PAD and PAD Merangin Regency efficiency has been very effective and efficient. The results of multiple linear regression with the variables DOF, effectiveness and efficiency of significant positive effect on capital spending. This suggests that any increase in the financial performance Capital expenditure will also rise.

Keywords: Financial Performance, Capital Expenditures, Decentralization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran keungan daerah Kabupaten Merangin menggunakan pendekatan rasio keuangan untuk mengukur derajat desentralisasi, tingkat efisiensi dan efektifitas keuagan daerah, serta mengetahui, menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung komponen kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal Kabupaten Merangin tahun 2001-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi masih sangat rendah dimana rata-rata selama 15 tahun hanya sebesar 5,16 % yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin masih belum berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah, dilihat dari efektifivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin sudah sangat efektif dan efisien. Hasil dari regresi linear berganda dengan variabel derajat otonomi fiskal, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kinerja keuangan maka Belanja Modal juga akan ikut naik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Belanja Modal, Desentralisasi

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawabnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut,

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih baik. Dan itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Dalam reformasi Undang-undang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan, khususnya sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Kedua Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 yang pada saat ini diganti dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999 yang pada saat ini diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah, yang kemudian kedua Undang-undang ini disebut dengan UU Otonomi Daerah.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemda dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah. Peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada, otonomi daerah memberikan keleluasan daerah untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Alokasi berbagai penerimaan PAD menjadi faktor penting dalam peningkatan Derajat Otonomi Fiskal yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Di era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan diberbagai sektor terutama sektor publik. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru yang dikarenakan kurangnya tingkat kesiapan fiskal yang berbeda-beda.

Kabupaten Merangin menghadapi masalah dalam hal kondisi keuangan yaitu masih rendahnya proporsi PAD terhadap APBD, dan sangat terlihat ketergantungan terhadap pemerintah begitu besar walaupun PAD setiap tahun mengalami kenaikan tetapi tidak secara signifikan.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal. Memang banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran hingga munculnya masalah-masalah keagenan, di antaranya kondisi keuangan daerah, kepentingan pribadi (*private interest*), kepentingan politik, perilaku oportunistik, moral *hazard*, dan sebagainya. Namun dari sekian banyak faktor, yang mudah diukur (*observable*) adalah faktor yang berasal dari keuangan daerah itu sendiri, jadi penelitian ini akan mengambil variabel yang berasal dari keuangan daerah, yaitu kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan derajat desentralisasi, efektifitas keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah. Alokasi belanja modal merupakan anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

METODE PENELITIAN

Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series* berupa laporan keuangan Kabupaten Merangin. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan berupa deret waktu (*time series*) dari tahun 2001-2015 yang merupakan data Kabupaten Merangin. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature, jurnal maupun hasil publikasi dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan penelitian.

Alat Analisis

Kinerja Keuangan Daerah

Halim (2001), mengutarakan bahwa analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Didalam organisasi pemerintah untuk terdapat beberapa ukuran dalam mengukuiur tingkat kinerja yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Mahmudi (2007) menyatakan bahwa Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan totl penerimaan daerah. Dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Adapun rasio ketergantungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R \quad K = \frac{K \quad D}{T \quad P} \times \frac{T \quad D}{D} \quad \times \quad \%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2002:128) sebagai berikut:

$$R \quad K = \frac{P \quad AS \quad D}{T \quad D \quad P_1} \times 1 \quad \%$$

Mahmudi (2007) memformulasikan rasio kemandirian daerah sebagai berikut:

$$R_{KKD} = \frac{R}{T} \times \frac{K}{P} \times \frac{A}{P_1 + P} \times \frac{D}{P_1} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio efektifitas ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) rasio ini menurut Mahmudi (2007) diformulasikan sebagai berikut :

$$R_E = \frac{R}{T} \times \frac{P_1}{P_1} \times \frac{P}{P} \times 100\%$$

Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan sangat menentukan dalam alokasi belanja modal, semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin tinggi juga peluang untuk alokasi belanjamodalnya (I Ketut, 2015).

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mardiasmo, 2005).

Rasio efisiensi yang tinggi juga harus dibandingkan dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

Mahmudi (2010) mengatakan bahwa kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Untuk

menghitung rasio efisien PAD diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pungut PAD. Adapun rasio efisiensi dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$E \quad P = \frac{B \quad P \quad P}{R \quad P} \times 1 \quad \%$$

Derajat Otonomi Fiskal

Menurut Rudy (2012) dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, *prinsip money should follow* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsifungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Dalam federalisme fiskal disebutkan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pentingnya *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Desentralisasi Otonomi Fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan, yang apabila persentasenya tinggi maka desentralisasi nya besar yang dapat diarti kan bahwa pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam keuangan daerah.

Derajat otonomi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan anatar jumlah Pendapatan Asli Daera dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007)

$$D = \frac{P \quad As \quad D \quad (P)}{T \quad P \quad D \quad (T)} \times 1 \quad \%$$

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Analisis menggunakan pengujian regresi linier berganda semilog yang merupakan tehnik statistik dan digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dimana hanya salah satu variabel (Y atau X) yang ditransformasi secara logaritma. Adapun persamaan regresi linear berganda semilog sebagai berikut:

$$L \quad B = \beta_0 + \beta_1 D + \beta_2 E + \beta_3 E + e$$

Ket:

Log BM= Belanja Modal (dalam Rupiah)

- α_0 = Konstanta
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien Regresi
- DOF= Desentralisasi Otonomi Fiskal (dalam persen)
- Efek= Efektifitas Keuangan Daerah (dalam persen)
- Efi = Efisiensi Keuangan Daerah (dalam persen)
- e_i = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Merangin

Derajat Otonomi Fiskal

Analisis tingkat kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bisa memperlihatkan tingkat kemandirian dan desentralisasi dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk menganalisis derajat otonomi fiskal digunakan perhitungan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.

Tabel 1. Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Berdasarkan Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Merangin Tahun 2001-2015

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	DOF (%)	Kategori
2001	4.756.450.700,00	114.596.311.650,00	4,15	Rendah Sekali
2002	8.459.339.000,00	180.146.790.900,00	4,70	Rendah Sekali
2003	10.314.859.000,00	201.180.957.000,00	5,13	Rendah Sekali
2004	12.065.485.000,00	218.180.959.800,00	5,53	Rendah Sekali
2005	14.959.006.969,00	271.595.491.154,00	5,51	Rendah Sekali
2006	17.922.794.212,00	336.348.679.057,00	5,33	Rendah Sekali
2007	20.028.473.828,00	435.943.457.470,00	4,59	Rendah Sekali
2008	23.898.956.243,00	446.513.186.161,00	5,35	Rendah Sekali
2009	27.822.176.728,00	560.470.389.962,00	4,96	Rendah Sekali
2010	25.316.313.065,00	531.283.520.430,00	4,77	Rendah Sekali
2011	39.647.951.626,00	707.018.268.976,00	5,61	Rendah Sekali
2012	30.112.526.351,00	794.253.487.214,00	3,92	Rendah Sekali
2013	44.396.136.300,00	925.553.738.914,00	4,80	Rendah Sekali
2014	67.200.333.088,00	1.039.099.785.394,00	6,47	Rendah Sekali
2015	76.949.713.278,00	1.158.516.668.503,00	6,64	Rendah Sekali
Rata-rata			5,16	Rendah Sekali

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merangin (data diolah)

Dari hasil persentase Kabupaten Merangin harus berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui menggali potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada tanpa dipengaruhi oleh perubahan dari kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah peraturan dan kebijakannya. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Rendahnya perolehan persentase yang dimiliki oleh Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain, masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, bahwa kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif kecil, maka kinerja keuangan daerah dinilai masih sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya PAD terhadap belanja yaitu:

- Masih adanya potensi pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah daerah, akan tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah.
- Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita.
- Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan yang ada.

Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Merangin

Tingkat efektifitas Kabupaten Merangin periode 2001-2015 di kategorikan efektif dan sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat efektivitas PAD Kabupaten Merangin tahun 2001-2015 adalah 118,26%. Tingkat efektifitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 140,99% dimana terdapat kelebihan sebesar 40,99% dari kategori efektif. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Merangin telah berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah dimana realisasi tersebut melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sedangkan yang terendah selama periode 2001-2015 terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 86,48% dimana terdapat selisih kurang sebesar 13,52% dari kategori efektif, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut masih banyak sumber PAD yang belum dioptimalisasikan, dan masih banyaknya objek pajak dan retribusi yang belum membayar kewajibannya.

Tabel 2 Perkembangan Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001-2015

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Efektifitas (%)	Ket
2001	4.756.450.700,00	3.373.490.050,00	140,99	Sangat efektif
2002	8.459.339.000,00	7.422.500.950,00	113,97	Sangat efektif
2003	10.314.859.000,00	9.742.380.000,00	105,88	Sangat efektif
2004	12.065.485.000,00	10.252.495.750,00	117,68	Sangat efektif
2005	14.959.006.969,00	11.459.321.000,00	130,54	Sangat efektif
2006	17.922.794.212,00	13.806.010.000,00	129,82	Sangat efektif
2007	20.028.473.828,00	10.448.853.000,00	191,68	Sangat efektif
2008	23.898.956.243,00	20.514.100.000,00	116,50	Sangat efektif
2009	27.822.176.728,00	23.448.000.000,00	118,65	Sangat efektif
2010	25.316.313.065,00	29.274.804.088,00	86,48	Efektif
2011	39.647.951.626,00	30.310.104.169,00	130,81	Sangat efektif
2012	30.112.526.351,00	33.846.430.365,00	88,97	Efektif
2013	44.396.136.300,00	46.905.881.776,00	94,65	Efektif
2014	67.200.333.088,00	62.502.681.008,00	107,52	Sangat efektif
2015	76.949.713.278,00	77.156.831.621,00	99,73	Efektif
Rata-Rata			118,26	Sangat efektif

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merangin (data diolah)

Dari Tabel 2 dapat terlihat selama periode waktu 2001-2015 Kabupaten Merangin selalu berhasil merealisasikan penerimaan PAD yang ditetapkan. Hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Kabupaten Merangin memang telah bekerja keras untuk dapat merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya agar tercapai.

2. Anggaran pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Merangin terlalu rendah dan dibawah dari kapasitas dan potensi yang ada di Kabupaten Merangin.

Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Merangin

Melihat dari hasil analisis rasio efisiensi yang dilakukan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Merangin dalam memungut sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan efisien. Dimana rasio tingkat efisiensi rata-ratanya berada pada kisaran dibawah dari 100% atau $4,79\% < 100$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin dikatakan mampu dalam menekan biaya-biaya yang ditimbulkan dari pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata dari tahun 2001-2015 sebesar 118,26% hanya menelan biaya sebesar 4,79%, berarti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2001-2015 relatif besar jika di bandingkan biaya dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efisiennya biaya dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah dalam memungut dapat tercapai, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain kesiapan aparatur-aparatur daerah, kondisi geografis wilayah, infrastruktur pendukung didaerah, dan sistem atau prosedur yang sederhana.

Tabel 3. Perkembangan Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001-2015

Tahun	Upah Pungut PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efisiensi (%)	Ket
2001	168.674.502,50	4.756.450.700,00	3,55	Sangat Efisiensi
2002	371.125.047,50	8.459.339.000,00	4,39	Sangat Efisiensi
2003	487.119.000,00	10.314.859.000,00	4,72	Sangat Efisiensi
2004	512.624.787,50	12.065.485.000,00	4,25	Sangat Efisiensi
2005	572.966.050,00	14.959.006.969,00	3,83	Sangat Efisiensi
2006	690.300.500,00	17.922.794.212,00	3,85	Sangat Efisiensi
2007	522.442.650,00	20.028.473.828,00	2,61	Sangat Efisiensi
2008	1.025.705.000,00	23.898.956.243,00	4,29	Sangat Efisiensi
2009	1.172.400.000,00	27.822.176.728,00	4,21	Sangat Efisiensi
2010	1.463.740.204,40	25.316.313.065,00	5,78	Sangat Efisiensi
2011	1.515.505.208,45	39.647.951.626,00	3,82	Sangat Efisiensi
2012	1.692.321.518,25	30.112.526.351,00	5,62	Sangat Efisiensi
2013	2.345.294.088,80	44.396.136.300,00	5,28	Sangat Efisiensi
2014	3.125.134.050,40	67.200.333.088,00	4,65	Sangat Efisiensi
2015	3.857.841.581,05	76.949.713.278,00	5,01	Sangat Efisiensi
Rata-Rata			4,79	Sangat Efisiensi

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merangin (data diolah)

Alokasi Belanja Modal Kabupaten Merangin

Tabel 4 memberikan persentase alokasi belanja modal Kabupaten Merangin. Dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal dari total keseluruhan belanja daerah Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi, dimana setiap tahun mengalami perubahan-perubahan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata alokasi selama 15 tahun (periode 2001-2015) hanya 26,84% hal ini tidak sesuai dengan amanat Perpres nomor 5

tahun 2010 tentang RPJMN dimana bahwa alokasi belanja modal dari belanja daerah adalah sebesar 30% dan sedang kan untuk belanja rutin lainnya sebesar 70%. Dalam mengalokasikan komponen belanja langsung yang berupa belanja modal Kabupaten Merangin harus memperhatikan beberapa hal yaitu mengarahkan belanja modal untuk pembangunan insfrastruktur yang menunjang investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin. Sehingga proporsi belanja modal dan belanja operasional lainnya dapat seimbang.

Tabel 4. Persentase Alokasi Belanja Modal Kabupaten Merangin Tahun 2001-2015

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Alokasi BM (%)
2001	101.810.389.000,00	21.386.380.000,00	21,01
2002	167.006.367.590,00	49.441.937.095,00	29,60
2003	196.361.690.950,00	53.683.174.385,00	27,34
2004	210.859.607.800,00	60.805.165.900,00	28,84
2005	219.011.587.417,00	69.805.165.900,00	31,87
2006	427.655.407.808,00	135.601.372.120,00	31,71
2007	435.750.209.888,00	150.650.198.573,00	34,57
2008	566.395.150.281,00	145.490.273.140,00	25,69
2009	570.627.220.829,00	151.790.378.796,00	26,60
2010	569.528.141.654,00	118.432.776.667,00	20,79
2011	712.131.469.580,00	177.541.033.517,00	24,93
2012	779.211.625.305,00	202.789.230.552,00	26,02
2013	875.903.861.097,54	212.060.023.739,70	24,21
2014	996.803.724.984,00	243.001.657.477,00	24,38
2015	1.243.917.400.105,00	311.552.109.238,00	25,05
Rata-rata			26,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merangin (data diolah)

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Pendugaan parameter pada penelitian ini menggunakan persamaan regresi liner berganda. Sedangkan data yang digunakan adalah data *time series* periode 2001-2015. Dari hasil regresi linear berganda ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	T-Hitung	Sig
Constanta	3.472.091	1.246866	0.0265
DOF	0.269285	2.750502	0.0189
Efektifitas	0.000227	2.251777	0.0457
Efisiensi	0.799238	2.560819	0.0265

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen (DOF, efektifitas, efisiensi) terhadap variabel depende (Belanja Modal) maka disusunlah sebuah persamaan sebagai berikutL

$$\text{LOG_BM} = 3.472091 + 0.2699285 (\text{DOF}) + 0.000227 (\text{Efek}) + 0.799238 (\text{Efi})$$

Persamaan diatas menunjukkan nilai konstanta positif sebesar 3.472091 menunjukkan pengaruh positif variabel independen (DOF, Efektifitas, Efisiensi). Apabila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel dependen (belanja modal) naik atau terpenuhi.

Uji Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. Dari hasil pendugaan melalui regresi linear berganda, didapat nilai F hitung sebesar 3.807475, sedangkan nilai F tabel sebesar 3.59 pada tingkat signifikan sebesar 0.05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima yang dikarenakan nilai F hitung > F tabel yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel bebas (DOF, Efektifitas, Efisiensi) terhadap variabel terikat Y (Belanja Modal). Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6 menunjukkan bahwa t hitung masing-masing variabel dan dibandingkan dengan t tabel (tingkat signifikan 0,05) didapat hasil bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Uji t

Variabel	T.Hitung	T.Tabel	Ket
DOF	2.750502	1,79588	Signifikan
Efektifitas	2.251777	1,79588	Signifikan
Efisiensi	2.560819	1,79588	Signifikan

Analisis Hasil Regresi

Melalui hasil perhitungan analisa regresi diperoleh R^2 sebesar 0,059420 atau 50,94%. Ini berarti variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Desentralisasi Otonomi Fiskal, Efektifitas, Efisiensi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel independen:

Variabel Desentralisasi Otonomi Fiskal

Berdasarkan uji t, dapat dilihat bahwa variabel tingkat Desentralisasi otonomi fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, koefisien regresi DOF juga menunjukkan koefisien yang sama yaitu positif. Hal ini menunjukkan apabila DOF meningkat maka Belanja Modal juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya dengan koefisien regresi sebesar 0,269285 menunjukkan apabila variabel variabel lain sebesar nol dan DOF meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,26%.

Variabel Efektifitas Keuangan Daerah

Berdasarkan uji t, dapat dilihat bahwa variabel tingkat Efektifitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, koefisien regresi efektifitas juga menunjukkan koefisien yang sama yaitu positif. Hal ini menunjukkan apabila tingkat efektifitas meningkat maka Belanja Modal juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya dengan koefisien regresi sebesar 0,0000227 menunjukkan apabila variabel variabel lain sebesar nol dan Efektifitas meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,0000227%.

Variabel Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan uji t, dapat dilihat bahwa variabel tingkat efisiensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, koefisien regresi tingkat Efisiensi juga menunjukkan koefisien yang sama yaitu positif. Hal ini

menunjukkan apabila tingkat Efisiensi meningkat maka Belanja Modal juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya dengan koefisien regresi sebesar 0,799238 menunjukkan apabila variabel variabel lain sebesar nol dan tingkat efisiensi meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,79%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Merangin periode 2001-2015 dilihat dari :
 - a. Derajat Otonomi Fiskal periode 2001-2015 rata-rata sebesar 5,16% hal ini berarti kemampuan fiskal atau Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dinyatakan rendah sekali sehingga kinerja anggaran juga rendah sekali/buruk sekali.
 - b. Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Merangin periode 2001-2015 di kategorikan efektif dan sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat efektivitas PAD Kabupaten Merangin tahun 2001-2015 adalah 118,26% yang dikategorikan sangat efektif. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Merangin telah berhasil merealisasikan pendapatn asli daerah.
 - c. Tingkat efisiensi keuangan Kabupaten Merangin daerah periode 2001-2015 dapat diketahui bahwa kinerja APBD Kabupaten Merangin dari sisi efisiensi PAD sangat efisien dimana rata-rata selama 15 tahun sebesar 4,79% yang dikategorikan sangat efisien.
2. Alokasi belanja modal dari total keseluruhan belanja daerah Kabupaten Merangin periode 2001-2015 mengalami fluktuasi, dimana setiap tahun mengalami perubahan-perubahan. Rata-rata alokasi belanja modal selama 15 tahun (periode 2001-2015) hanya 26,84% termasuk dalam kategori sangat rendah yang seharusnya proporsi belanja untuk belanja Operasional 70% dan belanja modal sebesar 30%. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja operasional terutama belanja pegawai.
3. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel DOF, Efektifitas Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah. Dari analisis data dan uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan semua variabel berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data maka sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menyarankan :

1. Untuk meningkatkan derajat otonomi fiskal, maka pemerintah daerah Kabupaten Merangin harus berusaha meningkatkan PAD dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, serta peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan administrator (SDM) dengan berbagai jalur pendidikan dan pelatihan. Dan pemerintah daerah Kabupaten Merangin diharapkan lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Merangin sebaiknya lebih bisa mengatur pengalokasian antara belanja operasional dan belanja modal atau belanja pembangunan dimana belanja modal sebagai salah satu alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dan meminimalisir alokasi belanja operasional.

- Dalam melakukan pengeluaran daerah, tidak semata-mata melalui pengalokasian belanja modal secara langsung, melainkan dapat mempertimbangan pengeluaran untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD.
3. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, agar berupaya meningkatkan kinerja keuangan daerah karena dapat memberikan dampak pada peningkatan alokasi belanja modal yang merupakan cerminan pembangunan daerah. Pemerintah juga sebaiknya lebih jeli dalam menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD, sehingga dapat tercipta keuangan daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang masih cukup besar diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk membiayai belanja operasional tetapi juga untuk belanja modal. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif yang menyusun APBD, sebaiknya lebih memperhatikan pengalokasian belanja modal di tahun-tahun yang akan datang terutama belanja modal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 4. Penelitian ini hanya menganalisis kinerja keuangan daerah di lihat dari 3 (tiga) rasio kinerja keuangan daerah yaitu desentralisasi otonomi fiskal, efektivitas keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah saja, dan hanya melakukan wawancara langsung kepada responden pada instansi terkait, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti rasio kemampuan keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efisiensi belanja, rasio likuiditas, dan solvabilitas, sehingga hasil penelitian lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. Karya Staya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Utara, Medan.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90
- Be Hukilo, Emanuel. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Sebelum dan Seseudah Otonomi Daerah)*. Tesis. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Damarsari,R.; Junaidi ;Yulmardi Y. (2015). Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 9-20

- Dewa Gde Bisma, I. Susanto Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal. Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No 3.
- Depdagri, 1997, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996, *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Gehi Batafor, Gregorius. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebata-Propinsi NTT*. Tesis. Universitas Udayana. Denpasar.
- Gujarati, Damodar N. 2001. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. PT Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPPSTIM YKPN Seri Bunga Rampai. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Juanda, Bambang. Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu*. IPB Pres. Bogor
- Karsa, I Ketut. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Propinsi Bali Tahun 2006s/d2013*. Tesis. Universitas Udayan. Denpasar.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Nengsih, Murniati. 2013. *Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah (APBD) Kabupaten Batang Hari (Periode 2001-2011)*. Tesis. Universitas Jambi. Jambi
- Prohani Sakti Badjuri, Gustian. 2012. *Analisis Peran PAD dan Upaya Peningkatannya dalam Memperkuat Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Batang Hari*. Tesis. Program Ekonomika Pembangunan Universitas Jambi.
- Rafniti, 2013. *Analisis Tingkat Kemadiriian dan Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungannya dengan belanja Modal Propinsi Jambi 2001-20.12*. Tesisi. Program Pascasarjana Magster Ilmu akuntansi Universitas Jambi.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-undang Nomor 17 tentang *Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 33 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 25 *Tentang standar akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 *Tentang standar akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 45 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Setiawan, Dwi endah Kusri. 2010. *Ekonometrika*. Andi. Yogyakarta.
- Supriadi, Arman Delis dan Slamet Rahmadi. 2013. *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo*. Jurnal. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1.

- Weny, Cherrya Dhia. 2012. *Analisis Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Forum Bisnis dan Kewirausahaan, Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2 No 1
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Eviews Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat. Jakarta